



LKj

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

Dinas Perhubungan Aceh

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020. LKj pada tahun 2020 merupakan LKj yang disusun pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMA dan Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LKj ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Aceh dalam melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Aceh.

Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan khususnya sektor transportasi.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 ini semoga dapat menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.

Banda Aceh, 24 Februari 2020
Kepala Dinas Perhubungan Aceh

JUNAIDI, ST, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19631231 199703 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Sistematika Penyajian	7
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 9
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	9
2.1.1. Visi Dan Misi	11
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran	12
2.1.3. Strategi Dan Kebijakan	14
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.3. Penetapan Kinerja Tahunan 2020	17
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	23
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	23
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	24



3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	25
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	35
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IV. PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Upaya Di Masa Mendatang	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.....	5
Tabel. 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	15
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017 – 2022	17
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020.....	18
Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020	19
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	24
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25
Tabel 3.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Bandara, Terminal dan Pelabuhan Tahun 2020.....	30
Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.7. Program dan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan	36
Tabel 3.8. Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	38
Tabel 3.9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	41
Tabel 3.10. Realisasi Fisik dan Keuangan	43
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2019 dengan 2020	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan adanya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan disetiap unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Banyak aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang



baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh selama Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja ini terselesaikan juga sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan selama 2020. Sehingga dalam penyusunannya selalu mengupayakan penyampaian data dengan spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam sektor perhubungan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Aceh.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.



1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan Aceh, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;
3. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi wilayah Aceh;
4. Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan data Kepegawaian sampai dengan akhir Tahun 2020, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Aceh berjumlah 259 orang, terdiri dari 156 orang Pegawai Negeri Sipil dan 103 Orang Tenaga Kontrak.

Adapun rincian PNS Dinas Perhubungan Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember 2020), pada tabel I, II dan III di bawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Golongan/Kepangkatan		Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	I/c	-
		I/d	-
2.	Golongan II	II/a	2
		II/b	6
		II/c	15
		II/d	11
3.	Golongan III	III/a	20
		III/b	33
		III/c	21
		III/d	35
4.	Golongan IV	IV/a	11
		IV/b	-
		IV/c	2
		IV/d	-
	Jumlah Total		156
	Pegawai Kontrak		103

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	1
2.	SLTP	-
3.	SMU	35
4.	D I	1
5.	Ahli Madya / D III	23
6.	D IV	6
7.	Sarjana / S1	69
8.	Pasca Sarjana / S2	20
9.	Doktoral / S3	0
10.	Profesi	1
Jumlah		156

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat PIM IV (ADUM)	16
2.	Diklat PIM III (SPAMA)	4
3.	Diklat PIM II (SPAMEN)	2
	Jumlah	22

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda, membawahi :
 - Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian
 - Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan
 - Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknolgi
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
 - Seksi Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
 - Seksi Seksi Sarana dan Angkutan
 - Seksi Prasarana
5. Bidang Pelayaran, membawahi :
 - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan
 - Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
 - Seksi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6. Bidang Penerbangan, membawahi :
 - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
 - Seksi Keamanan Penerbangan
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara.
7. UPTD Penyelenggara Terminal Type B, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Operasional
 - Seksi Fasilitas Terminal



- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :



Beberapa isu strategis terkait Sektor Perhubungan, berdasarkan faktor- faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada. Isu ini adalah akumulasi permasalahan pelayanan yang sering dihadapi dan peluang-peluang yang ada, maka beberapa isu strategis pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan konektivitas transportasi antar wilayah yang telah mengakibatkan tertinggalnya pembangunan di daerah kepulauan, terisolir dan terpencil.
- b. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalihkan kewenangan pengelolaan Terminal Type B yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota.
- c. Lonjakan pertumbuhan penduduk perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2025 diperkirakan akan melebihi 500.000 orang, dengan demikian perlu merencanakan dan mengelola kebutuhan infrastruktur angkutan massal.
- d. Perencanaan sistem transportasi perkotaan yang berorientasi lingkungan sebagai upaya mereduksi pencemaran dan mengurangi polusi yang mengakibatkan pemanasan global perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sektor transportasi.
- e. Kondisi geografis pengembangan pariwisata dan upaya mitigas bencana membutuhkan sarana dan prasarana transportasi penerbangan yang memiliki karakteristik pelayanan cepat.
- f. Pengendalian terhadap penyebab kecelakaan transportasi melalui upayaupaya pencegahan meliputi penertiban dan sosialisasi terhadap persyaratan kelaikan sarana transportasi.
- g. Pengendalian terhadap penyebab kecelakaan transportasi melalui upayaupaya pencegahan meliputi penertiban dan sosialisasi terhadap persyaratan kelaikan sarana transportasi.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh selama satu tahun di tahun 2019. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan sebuah pembangunan melingkupi berbagai tahapan pelaksanaan, yaitu berawal dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017 – 2022 dan sinkron dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Tahapan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMA dimaksud, dijabarkan secara lebih terinci dalam pengembangan sektor Perhubungan. Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Aceh secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perhubungan Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022.

Pembangunan sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promotion sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*). Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, lebih-lebih dalam kegiatan perekonomian.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini masih terkait konektivitas. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.



2.1.1. VISI DAN MISI

Adapun yang menjadi Visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh, terkait dengan telaahan ini menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur Aceh Terpilih 2017-2022. Visi Gubernur Aceh terpilih adalah *“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama’ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sesuai Visi dan misi tersebut di atas adalah menjadi bagian dari misi *“Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan”* sesuai dengan tugas



pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor perhubungan.

Adapun output/outcome yang ingin dicapai di sektor perhubungan yaitu :

- 1) Meningkatnya persentase standar pelayanan fasilitas perhubungan;
- 2) Meningkatnya persentase kelancaran arus lalu lintas;
- 3) Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan;
- 4) Menurunnya jumlah kasus angka kecelakaan lalu lintas;
- 5) Meningkatnya persentase kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai sesuai standar;
- 6) Meningkatnya persentase jumlah kendaraan bermotor layak jalan;
- 7) Meningkatnya persentase pelayanan angkutan;
- 8) Meningkatnya pengguna angkutan umum massal, angkutan sewa dan angkutan perintis

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari rencana kerja SKPA mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMA, yaitu sesuai dengan misi *“Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan”* maka tujuan jangka menengah sektor Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;
- b. Pengelolaan terminal type B yang modern;
- c. Penyediaan angkutan umum perkotaan Kota Banda Aceh yang mampu memenuhi pergerakan;
- d. Mitigasi efek gas rumah kaca sektor energi subsector transportasi;
- e. Penyediaan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi yang sesuai standar yang mendukung pariwisata dan mitigasi kebencanaan;
- f. Peningkatan keselamatan transportasi;



- g. Pengembangan sistem transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPJMA yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan adalah “Meningkatnya konektivitas antar wilayah”, maka sasaran jangka menengah sektor Perhubungan:

- a. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan yang menghubungkan wilayah kepulauan dan Kawasan;
- b. Terwujudnya peningkatan fasilitas dan pelayanan terminal type B;
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi Transkoetaradja yang diselenggarakan secara mandiri;
- d. Terwujudnya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor energi subsektor transport;
- e. Terwujudnya infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan (Komite FAL);
- f. Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- g. Fasilitas cargo perikanan Bandara Maimun Saleh – Sabang;
- h. Fasilitas terminal penyeberangan Internasional di Pelabuhan Kuala Langsa;
- i. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan angkutan sungai yang menghubungkan Kawasan terpencil (Angkutan Sungai Muara Situlen – Gelombang – Singkil);
- j. Terbangunnya kereta api perkotaan Kota Banda Aceh dan sekitarnya.



2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mendukung program Unggulan Aceh Hebat maka Dinas Perhubungan Aceh juga berperan khususnya di sektor perhubungan, yaitu Program Unggulan “Aceh Seumeugot” dimana diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh dalam lima tahun mendatang.

Untuk mencapai Misi ke-10 Pemerintah Aceh yang bertujuan mengurangi ketimpangan antar wilayah akan ditempuh melalui kebijakan membangun konektivitas transportasi antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan, kualitas infrastruktur dan pelayanan yang memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri Perhubungan, angkutan transkoetaradja, transportasi ramah lingkungan, kualitas pelayanan infrastruktur yang aman, nyaman dan handal, pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan, keselamatan transportasi menuju zero accident, pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan.

Adapun yang menjadi strategi bagi berbagai kebijakan yang ada sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani				
Misi ke-10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Terwujudnya peningkatan /perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan yang menghubungkan wilayah	Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan	Membangun konektivitas transportasi antar wilayah	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan untuk Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Aksesibilitas Kawasan
		Penetapan kejelasan aset dan kewenangan	Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan	Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan 8 (delapan) Pelabuhan Penyeberangan
		Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota		Pengembangan Angkutan Sungai
		Kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan	Pengadaan Sarana Angkutan Penyeberangan
				Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara sebagai Gerbang Ekonomi Wilayah
				Pembentukan UPTD Pelayanan Transportasi pada 4 (empat) zona pengembangan transportasi
Pengelolaan Terminal Type B yang modern	Terwujudnya Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Terminal Type B	Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta	Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan yang memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri Perhubungan	Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan 9 (sembilan) Terminal Type B
Penyediaan angkutan umum perkotaan Kota Banda Aceh yang mampu memenuhi	Terwujudnya Peningkatan pelayanan transportasi Transkoetaradja yang diselenggarakan secara	Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta	Angkutan Transkoetaradja menuju Badan Layanan Umum	Pembangunan Bus Rapid Transit perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya
				Pembangunan Kereta Api Perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya
Mitigasi efek Gas Rumah Kaca sektor energi subsektor transportasi	Terwujudnya Penurunan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor energi subsektor transportasi	Revitalisasi perkeretaapian Aceh Lintas Timur	Transportasi ramah lingkungan	Revitalisasi Kereta Api Lintas Timur
		Penciptaan angkutan massal perkotaan		Revitalisasi Angkutan Umum Perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah terhadap Emisi Gas Rumah Kaca		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Penyediaan Kualitas pelayanan infrastruktur transportasi yang sesuai standar yang mendukung pariwisata dan mitigasi kebencanaan	Terwujudnya infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan (Komite FAL)	Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta	Kualitas pelayanan infrastruktur yang aman, nyaman dan handal	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Penerbangan
		Penetapan kejelasan aset dan kewenangan	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan	Pengembangan Jaringan Infrastruktur dan Jaringan Pelayanan Sistem Transportasi Logistik Aceh
		Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota		
Peningkatan Keselamatan transportasi	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	Pemenuhan standar minimal terhadap prasarana dan fasilitas keselamatan	Keselamatan transportasi menuju <i>Zero Accident</i>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan
Pengembangan sistem transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan	Fasilitas cargo perikanan Bandara Maimun Saleh - Sabang	Kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona pengembangan	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan	Kajian Pembangunan terminal cargo perikanan
	Fasilitas terminal penyeberangan Internasional di Pelabuhan Kuala Langsa			Kajian Peningkatan prasarana pelabuhan penyeberangan Internasional Kuala Langsa
	Terwujudnya peningkatan /perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan angkutan sungai yang menghubungkan Kawasan terpencil (Angkutan Sungai Muara Situlen - Gelombang - Singkil)			Kajian Angkutan Sungai Muara Situlen - Gelombang - Singkil
	Terbangunnya kereta api perkotaan Kota Banda Aceh dan sekitarnya			Kajian pembangunan kereta api perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam melaksanakan program pembangunan daerah bidang perhubungan, terdapat indikator-indikator yang harus dicapai dalam pemenuhan kinerja, dan sebagai bahan dasar penyusunan kegiatan Tahun 2020.

Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Aceh sebagai berikut :



**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Aceh
Tahun 2017 - 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	$\alpha \text{ km} = (6 \text{ unit rambu} \times \alpha) + (0,6 \text{ Rppj} \times \alpha) + (12 \text{ unit Deliniator} \times \alpha) + (5 \text{ Beam Guardrail} \times \alpha) + (125 \text{ modul marka jalan} \times \alpha)$	Setiap 1 km panjang jalan (daerah rawan kecelakaan) wajib terpasang 6 unit rambu / 0,6 unit Rppj / 12 unit Deliniator / 5 Beam Guardrail / 125 modul marka jalan	Bidang LLAJ Dishub Aceh	
2	Meningkatnya Kapasitas sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangan provinsi	Persentase Peningkatan arus penumpang	Jumlah orang melalui dermaga/terminal per tahun	Jumlah orang yang melalui dermaga/terminal kewenangan provinsi per tahun	Bidang LLAJ & Bidang Pelayaran Dishub Aceh	

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Aceh Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017- 2022, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Perubahannya.

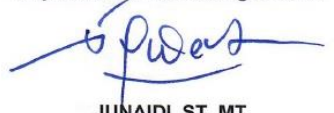
Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dalam mencapai Sasaran Strategik Dinas Perhubungan Aceh. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Aceh dengan Gubernur Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	- Persentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan - Indeks kepuasan pelayanan angkutan	73% 0,85%

Program	Anggaran
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 4.621.065.538
2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 9.880.228.149
3 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 131.871.534.225

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT Plt. Gubernur Aceh	Banda Aceh, 2020  JUNAI, ST, MT Kepala Dinas Perhubungan Aceh
--	---

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2020 tersebut, Dinas Perhubungan Aceh mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.277.032.870.479,00 dengan 7 (tujuh) program dan 91 (sembilan puluh satu) kegiatan. Namun disebabkan pandemi *Covid-19*, Pemerintah Aceh melakukan Refocusing terhadap anggaran sehingga menjadi Rp.192.011.536.820,00. Diantara 7 (tujuh) program tersebut terdapat 3 (tiga) program dengan 46 kegiatan spesifik dalam mendukung bidang Perhubungan.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi, Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2020 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan	73%	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	131.871.534.225
				1. Rencana Induk Kreta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh	1.099.931.311
				2. Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pengembangan Sistem & Multimoda)	528.354.329
				3. Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pelayanan)	940.813.406
				4. Pemeliharaan SBNP	300.916.000
				5. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)	42.575.000.000
				6. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)	34.066.000.000
				7. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)	22.744.725.000
				8. Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan	1.408.542.428
				9. Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja	13.490.818.483
				10. Pengadaan Halte Portable	387.890.061
				11. Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja	211.239.168
				12. Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja	1.349.301.057
				13. Pemeliharaan Digital Signage pada Halte Trans Kutaraja	50.000.000
				14. Pemeliharaan Aksesoris Interior dan Eksterior Bus Trans Kutaraja	242.000.000
				15. Penyelenggaraan Terminal Tipe B	896.185.622
				16. Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Singkil	570.463.300
				17. Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM	1.797.045.937
				18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan	1.730.033.472
				19. Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues	2.162.001.499
				20. Kajian Pelayanan di Kabupaten Aceh Singkil	500.802.776
				21. Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Selatan	2.637.047.000
				22. Peningkatan Fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Babon	2.182.423.376



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,85%	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	4.621.065.538
				1. Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum	330.597.936
				2. Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik	111.654.340
				3. Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran	1.396.792.300
				4. Pengaturan Kelancaran lalu Lintas Penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji	94.536.889
				5. Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional	427.234.400
				6. Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah	599.190.400
				7. Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana	287.817.319
				8. Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan	250.341.741
				9. Pembinaan Bengkel Karoseri	79.892.400
				10. Penertiban Angkutan Umum	271.483.576
				11. Wahana Tata Nugraha	239.986.927
				12. Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin	105.934.918
				13. Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja	112.748.156
				14. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	30.520.500
				15. Pekan Nasional Keselamatan Jalan	282.333.736
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	9.880.228.149
				1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh	499.972.853
				2. Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat daya	974.965.684
				3. Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren	969.693.133
				4. Pengadaan Delinator pada ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek	649.570.004
				5. Pengadaan Traffic Light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhoksukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.728.989.800
				6. Pengadaan cermin tikungan pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Kreung Geukueh Kab. Aceh Utara	548.320.044
				7. Ruas Jalan ada titik Keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Tumon - Singkil	399.997.480
				8. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Gayo Lues - Babah Rot	2.075.966.767
				9. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Lokop - Gayo Lues - dan lintasan Pining - Blang Kejeren	2.032.752.384
Program					Anggaran (Rp)
1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN					4.621.065.538
2. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS					9.880.228.149
3. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					131.871.534.225



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Aceh memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan Aceh dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.



3.1 . CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.



3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Dari 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perhubungan Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 2 (indikator kinerja) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2020 yaitu :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan	%	73 %	62 %	84,93 %	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan Darat)	%	0,85 %	0,2 %	23,53 %	

3.1.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dengan membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat perbandingan capaian kinerja yang naik dan yang turun. Seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
TAHUN 2018					
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan	70%	69,65%	99,5 %
2	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,6%	3,55%	136,5 %
TAHUN 2019					
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan	70%	67,22%	96 %
2	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,6%	11,60%	446 %
TAHUN 2020					
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan	73%	62%	84,93 %
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan Darat)	0,85%	0,2%	23,53 %

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Indikator Kinerja	Capaian		Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)
		2018	2019	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
1	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan	58	61	73	62	85	92
2	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas (Indeks Konektivitas)	0,14	0,14	3,43	0,2	5	3,52
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,1	0,1	0,85	0,2	24	0,98
	Rata-rata Persentase Tingkat Capaian					38	

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan dari Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis, rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 masih belum mencapai target RPJMA Tahun 2017-2022, ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian masih belum tercapai.

Indikator 1, Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan

Sesuai tabel diatas realisasinya tergolong masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 73 %, sedangkan realisasinya baru mencapai 62 % dengan capaian kinerja 84,93 %.

Ada beberapa faktor utama yang dinilai mempengaruhi standar pelayanan adalah keamanan, kenyamanan dan keterjangkauan. Terminal adalah titik tempat penumpang dan barang masuk dan keluar dalam suatu jaringan transportasi dan menjadi titik kemungkinan paling besar terjadinya kemacetan.

Tingkat pelayanan (level of service) merupakan ukuran karakteristik pelayanan secara keseluruhan yang mempengaruhi pengguna jasa. Tingkat pelayanan merupakan

elemen dasar terhadap penampilan komponen-komponen transportasi, sehingga pelaku perjalanan tertarik untuk menggunakan suatu produk jasa transportasi.

Faktor utama yang membandingkan tingkat pelayanan transportasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

1. Untuk kerja elemen-elemen yang mempengaruhi pengguna jasa, seperti kecepatan operasi, kepercayaan dan keamanan.
2. Kualitas pelayanan, mencakup elemen-elemen kualitatif pelayanan seperti : kenyamanan, perilaku penumpang, keindahan dan kebersihan.
3. Harga yang harus dibayar oleh pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan.

Hal-hal yang mempengaruhi Pelayanan Fasilitas Perhubungan adalah :

1. Kondisi Prasarana Terminal

Pelayanan jasa transportasi merupakan pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi jalan. Dalam hal perencanaan, pembangunan dan penyelenggaraan terminal, permasalahan umum yang berkembang adalah terminal yang ada pada saat ini belum beroperasi secara optimal dan kurang memperhatikan kualitas dari pelayanannya sehingga masyarakat kurang mendapatkan kepuasan.

Ada beberapa terminal di Tahun 2018 yang memang tidak beroperasi, sehingga tidak adanya data penumpang, karena mobil tidak masuk terminal, tetapi di Tahun 2019 sudah mulai beroperasi seperti Terminal Pidie Jaya, Terminal Bireun dan Terminal Subulussalam, sehingga adanya aktivitas di beberapa terminal tersebut.

Perencanaan penetapan lokasi pembangunan terminal wajib dilakukan kajian terlebih dahulu, faktor aksesibilitas menjadi hal yang terpenting. Terminal tidak perlu besar, luas dan mewah, akan tetapi terminal yang dapat berfungsi dengan baik dengan fasilitas terminal yang memadai.

Solusi :

1. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana terminal.
2. Meningkatkan keselamatan transportasi jalan yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan kebutuhan.
3. Terminal dapat difungsikan sebagai check point untuk kelaikan jalan kendaraan umum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Mengoptimalkan potensi yang ada, untuk secara terus menerus menjadikan terminal yang fungsional, bersih, asri dan indah.
5. Upaya yang lebih besar untuk keluar dari situasi krisis yang muncul akibat Covid-19 di sektor transportasi darat dengan tetap mengusahakan pelayanan yang sama seperti ketika situasi "normal". Namun dikombinasikan dengan protokol kesehatan yang lebih diperketat seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, tidak berbicara dan makan minum di dalam kendaraan umum.

2. Kondisi Prasarana Bandara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang standar pelayanan pengguna jasa bandar udara, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau dan terukur.

Ada 4 faktor utama tentang standar pelayanan pengguna jasa Bandar Udara yaitu :

1. Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang disebut dengan tingkat pelayanan (Level of service), meliputi : pemeriksaan penumpang dan bagasi, pelayanan check in, migrasi



keberangkatan, imigrasi kedatangan, pelayanan bea cukai, ruang tunggu keberangkatan dan pelayanan bagasi.

2. Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang meliputi : pengkondisian suhu, pengkondisian cahaya, kemudahan pengangkutan bagasi, kebersihan, pelayanan informasi, toilet, tempat parkir dan fasilitas pengguna kebutuhan khusus.
3. Fasilitas yang memberikan nilai tambah merupakan layanan tambahan, meliputi : musholla, nursery, fasilitas berbelanja, restoran, ruang merokok, ruang bermain anak, ATM/money changer, internet/wifi, fasilitas pemberian tiket, charging station, fasilitas air minum dan lounge eksekutif.
4. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada waktu sibuk digunakan sebagai prakiraan awal kebutuhan pengembangan fasilitas meliputi : luas per penumpang pada jam sibuk dan indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian.

Solusi :

1. Fasilitas fisik (gedung terminal, ruang tunggu, counter check-in, toilet dan lain-lain) di bandara selalu bersih dan menarik perhatian.
2. Peralatan di Bandara harus selalu mutakhir/baru.
3. Atribut-atribut yang menjadi prioritas adalah kecepatan pelayanan airport tax dan imigrasi, ketersediaan flight progres display.
4. Ketersediaan fasilitas bandar udara yang sesuai dengan kebutuhan penumpang.
5. Upaya yang dapat dilakukan di masa pandemi seperti penyesuaian jadwal operasional dengan jumlah penumpang. Selain itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tingginya kekhawatiran atas penularan Covid-19, maka terdapat prosedur yang harus dijalankan setiap penumpang. Beberapa diantaranya seperti :



- a. Membawa surat keterangan bebas Covid-19;
- b. Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik (E-HAC);
- c. Wajib menggunakan masker di bandara dan di pesawat;
- d. Menerapkan physical distancing dan beberapa syarat tambahan jika melalui wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3. Kondisi Prasarana Pelabuhan

Masyarakat menginginkan pelayanan yang berkualitas, yakni pelayanan tepat waktu, nyaman dan aman. Pelayanan penumpang dipelabuhan dimulai dari pelayanan di tempat pemberhentian angkutan umum atau lokasi parkir kendaraan di pelabuhan, pelayanan menuju lokasi terminal penumpang, pelayanan di terminal penumpang dan pelayanan menuju pintu masuk kapal.

Kondisi sebagian besar terminal penumpang sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya penumpang umumnya dinilai kurang memadai. Kondisi fisik terminal penumpang dipelabuhan, rata-rata berusia tua, kurang terawat dengan cat yang sudah kusam, dan fasilitas umum yang tersedia tidak dijaga kondisinya.

Selain itu kesimpangsiuran sirkulasi penumpang saat akan naik maupun turun dari kapal biasanya terjadi pada hari-hari besar keagamaan dan libur nasional karena adanya lonjakan penumpang.

Ada 3 faktor utama pelayanan angkutan laut /penyeberangan :

- a. Kenyamanan diatas kapal
- b. Kenyamanan di pelabuhan
- c. Aksesibilitas



Solusi :

Aspek pelayanan yang perlu diperbaiki adalah :

- Kebersihan, kenyamanan dan penerangan diruang tunggu dan area pelabuhan.
- Ketersediaan fasilitas ruang tunggu pelabuhan asal.
- Kecukupan kapasitas ruang tunggu pelabuhan.
- Tingkat kemudahan informasi dipelabuhan.
- Besaran ongkos/tarif angkutan umum menuju pelabuhan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kondisi sarana dan prasarana bandara, terminal dan pelabuhan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Bandara, Terminal dan Pelabuhan Tahun 2020

NO	BANDARA	KONDISI (%)	PELABUHAN LAUT	KONDISI (%)	PELABUHAN PENYENERANGAN	KONDISI (%)	TERMINAL TYPE B	KONDISI (%)
1	Sultan Iskandar Muda	97	Malahayati	42	Ulee Lheu	75	Terminal Pidie	72
2	Cut Nyak Dhien - Nagan Raya	95	Sabang	36	Balohan	50	Terminal Pidie Jaya	64
3	Lasikin - Sinabang	95	Kuala Langsa	53	Lamteng	32	Terminal Bireun	62
4	T. Cut Ali - Tapaktuan	95	Tapaktuan	71	Sinabang	77	Terminal Tamiang	74
5	Rembele Bener - Meriah	95	Singkil	81	Pulau Banyak	57	Terminal Aceh Jaya	50
6	Maimun Saleh - Sabang	95	Calang	55	Singkil	67	Terminal Nagan Raya	23
7	Malikussaleh - Lhokseumawe	80	Abdya	38	Labuhan Haji	79	Terminal ABDYA	73
8	Kuala Batu - Blang Pidie	37	Lhokseumawe	37	Meulaboh	89	Terminal Subulussalam	68
9	Alas Leuser - Kutacane	80	Meulaboh	7			Terminal Singkil	77
10	Syekh Hamzah Fanshuri - A. Singkil	52	Idi	13			Terminal Bener Meriah	48
11	Patiambang - Gayo Lues	44	Sinabang	30				
12	Point A Mobil Oil - Lhoksukon	79						
TOTAL		78,67		42,09		65,75		61,10
TOTAL PERSENTASE KONDISI SARANA PERHUBUNGAN TAHUN 2020		62 %						



Indikator 2, Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan Darat)

Berdasarkan tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis realisasinya masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,85 % dan realisasinya hanya sebesar 0,2 % atau dengan capaian kinerja 23,53 %.

Terdapat empat faktor utama yang dinilai mempengaruhi masyarakat dalam memilih transportasi darat yang akan digunakan untuk mendukung mobilitasnya. Keempat faktor tersebut adalah :

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan dan
- d. Keterjangkauan

Pemenuhan akan keempat aspek tersebut, akan membuat moda transportasi darat di kota makin digemari oleh konsumen atau masyarakat di daerah perkotaan.

Moda transportasi perkotaan terutama di daerah urban terus membaik dari waktu ke waktu. Ketika sebuah moda transportasi makin terjangkau, aman, nyaman dan menjamin keselamatan, maka akan makin digemari dan menjadi pilihan utama konsumen.

Diharapkan penyelenggara atau perusahaan penyedia jasa transportasi darat di daerah urban terus memperkuat keempat faktor tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, yang berdampak kepada kemacetan di jalanan.

Adapun, dari sejumlah moda transportasi darat di daerah kawasan perkotaan, ojek online, taksi online, Bus Trans Koetaradja menjadi yang paling memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan.

Masih banyak moda-moda transportasi yang ada belum memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan. Seperti izin trayek yang sudah mati pada

sejumlah angkutan kota transportasi darat yang beroperasi dan belum banyak dilakukan tindakan penertiban.

Pengujian kendaraan bermotor atau biasa yang disebut uji KIR juga sangat mempengaruhi keselamatan bagi transportasi.

Ada tiga tujuan dari Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, taxi, truk, pickup dan angkutan umum.
2. Mendukung kelestarian lingkungan dari pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang.

Pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi. Kebutuhan pelayanan transportasi terus meningkat secara kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu sehingga tak sedikit timbul persoalan dalam penyelenggaraannya. Namun pandemi Covid-19 ini sempat menurunkan aspek pergerakan masyarakat pada seluruh sektor, mulai dari pergerakan masyarakat itu sendiri, logistik dan sebagainya.

Dari data yang ada, produksi terminal semenjak terjadinya Covid-19 sangat menurun drastis. Kondisi Covid-19 berdampak pada industri transportasi darat dalam hal ini bus, kemudian angkutan. Untuk logistik tidak begitu tampak sekali karena memang saat Covid-19 justru sektor logistik menjadi prioritas utama.

Untuk menghadapi Covid-19 saat ini ada paradigma baru dalam transportasi. Sebelumnya dalam layanan transportasi ada aspek aman, selamat, tertib dan lancar yang harus dijaga. Semenjak Covid-19 ini terdapat tiga aspek baru yaitu aspek sehat, bersih dan humanis.

Kebijakan lain diantaranya menjaga jarak aman dengan pembatasan kapasitas angkut penumpang, penggunaan masker untuk pengguna dan juga pengemudi ataupun kru. Untuk angkutan darat jarak jauh, ada pengecekan suhu tubuh dalam perbatan masuk dan keluar dari Provinsi Aceh.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan antara lain :

- a. Trayek angkutan sudah kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.
- b. Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi.
- c. Banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.
- i. Kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan. Ini juga karena tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan.

Solusi :

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

- a. Sejumlah terminal bus harus mulai representatif dan ramah penumpang, terlebih fasilitas prasarana terminalnya.
- b. Tahun 2021, sekitar 4 terminal yang akan direvitalisasi guna melayani angkutan darat yang lebih baik lagi.
- c. Uji KIR kendaraan wajib hukumnya untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- d. Tetap melayani transportasi baik darat, laut maupun udara dengan pembatasan penumpang.



- e. Protokol Kesehatan harus diterapkan dalam setiap pelayanan transportasi, baik darat, laut maupun udara.
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) harus diterapkan guna menjamin keselamatan penumpang.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi sumber daya dari 2 (dua) indikator dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	131.871.534.225	121.109.289.849	91,84	8,16
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan Darat)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.621.065.538	3.017.819.230	65,31	34,69
			Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	9.880.228.149	9.046.330.470	91,56	8,44
RATA - RATA						83	17,10

Pada sasaran Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah, untuk program peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 4.621.065.538 dan terealisasi sebesar Rp. 3.017.819.230 atau sebesar 65,31 % dengan tingkat efisiensi sebesar 34,69 %. Dari pencapaian realisasi terlihat bahwa ini menunjukkan realisasinya sudah baik, walau masih ada sisa anggaran yang tidak habis.

Pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan anggaran sebesar Rp. 9.880.228.149 dan terealisasi sebesar Rp. 9.046.330.470 atau 91,56 % dengan tingkat efisiensi sebesar 8,44 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.

Pada program pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 131.871.534.225 dan terealisasi sebesar Rp. 121.109.289.849 atau 91,84 % dengan tingkat efisiensi sebesar 8,16 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

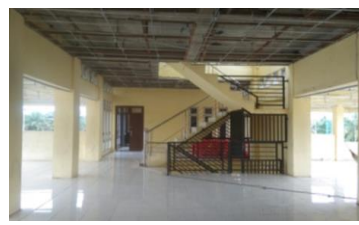
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh dengan 1 (satu) sasaran strategis ini didukung oleh 3 (Tiga) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan, adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan

PROGRAM	KEGIATAN	
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1.	Rencana Induk Kreta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh
	2.	Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pengembangan Sistem & Multimoda)
	3.	Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pelayaran)
	4.	Pemeliharaan SBNP
	5.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)
	6.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)
	7.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)
	8.	Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan
	9.	Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja
	10.	Pengadaan Halte Portable
	11.	Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja
	12.	Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja
	13.	Pemeliharaan Digital Signage pada Halte Trans Kutaraja
	14.	Pemeliharaan Aksesoris Interior dan Eksterior Bus Trans Kutaraja
	15.	Penyelenggaraan Terminal Tipe B
	16.	Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Singkil
	17.	Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM
	18.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan
	19.	Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiembang Kab. Gayo Lues
	20.	Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil
	21.	Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan
	22.	Peningkatan Fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Babon

Untuk mendukung indikator Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Fasilitas Perhubungan, maka disusun Program Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan sebagai berikut :



		
Pembangunan Kapal Ferry Ro-Ro 1300 GT (Aceh Hebat 1)	Pembangunan Kapal Ferry Ro-Ro 1100 GT (Aceh Hebat 2)	Pembangunan Kapal Ferry Ro-Ro 600 GT (Aceh Hebat 3)
		
Penyelenggaraan Angkutan Massal Trans Kutaraja 5 Koridor, Koridor 1, Koridor 2a, Koridor 2b, Koridor 3 dan Koridor 5		
		
Pagar Pembatas Dan Drainase Sisi Darat Bandara Patiambang (Pagar 1.723 m x 18 Tingkat Kawat Besi, Saluran 330 m, Kolam resapan 2 Unit 25 x 25 x 1.5 m, Rehab Talud 53 x 4 m		
		
Revitalisasi Terminal Type B Singkil (rehab Gedung 2 Lantai, Keramik Lantai, Dag Beton, Instalasi Listrik & Air, Kamar Mandi, Plafond Lantai 2, Toilet, Pengecatan		
		
Rehabilitasi Causeway Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji (Rehab Gangway 60 m, Rehab Causeway 145.79 m x 7.8 m, Ganti Frontal Frame 7 Unit, Talud 16 m)		
		
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon (Rehab atap gedung terminal, sumur bor & tower, atap parkir roda 2, atap parkir roda 4, pintu pagar, atap causeway)		

Untuk mendukung indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan, maka disusun Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas yang mempunyai kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

PROGRAM	KEGIATAN	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh
	2.	Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat daya
	3.	Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren
	4.	Pengadaan Delinator pada ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek
	5.	Pengadaan Traffic Light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhoksukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan
	6.	Pengadaan cermin tikungan pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Kreung Geukueh Kab. Aceh Utara
	7.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan ada titik Keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Tumon - Singkil
	8.	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Gayo Lues - Babah Rot
	9.	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Lokop - Gayo Lues - dan lintasan Pining - Blang Kejeren

		
Rambu Lalu lintas 639 Buah dan Rambu Chevron 10 Buah Pada Ruas Jalan Batas Pidie - Meulaboh		
		
Marka Sepanjang 60 Km Pada Lintasan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya		
 22/11/20 09.54 2°49'45.912"N 97°37'36.771"E Trumon, Kabupaten Aceh Selatan 23774 Indonesia		
Marka Sepanjang 9.424 Km dan Zebra Cross : 8 Titik Pada Ruas Jalan Lintasan Trumon - Singkil		
		
Pagar Pengaman Jalan Sepanjang 425 M di 6 titik lokasi Pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren		
 DL 1	 DL 13	 DL 2
Deliniator Sebanyak 889 Buah di 28 Titik Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek		





Cermin Cembung 129 Buah Untuk 3 Lokasi (Aceh Tengah 91 Buah, Bener Meriah 32 Buah, Aceh Utara 6 Buah)



Guardrail Dan Rolling Guardrail/Barrier sepanjang 80 M Pada Lintasan Gayo Lues - Babah Rot



Guardrail Dan Rolling Guardrail/Barrier sepanjang 82 M Pada Lintasan Lokop - Gayo Lues dan Lintas Pining - Blangkejeren



Pemeliharaan dan perbaikan/ ganti Alat Box Control, Jaringan, Pengecatan, Patok Pengaman Traffic Di 3 Lokasi : Abdya 1, Aceh Selatan 1



Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di 9 Titik Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek

Untuk mendukung indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan, maka disusun Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang mempunyai kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

PROGRAM	KEGIATAN	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.	Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum
	2.	Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik
	3.	Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran
	4.	Pengaturan Kelancaran lalu Lintas Penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji
	5.	Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional
	6.	Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah
	7.	Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana
	8.	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan
	9.	Pembinaan Bengkel Karoseri
	10.	Penertiban Angkutan Umum
	11.	Wahana Tata Nugraha
	12.	Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin
	13.	Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja
	14.	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan
	15.	Pekan Nasional Keselamatan Jalan



3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 192.011.536.820,- yang dijabarkan dalam 7 Program dan 62 Kegiatan. Dari anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) terealisasi sebesar Rp. 152.521.136.350,- atau 79,43 % dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terealisasi sebesar Rp. 17.806.757.983,- atau 9,27 %.

Sedangkan dari 7 Program dan 62 Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 3 program dan 46 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 146.372.827.912,- atau 76,23 % dari total anggaran, dan yang terealisasi sebesar Rp. 133.173.439.549,- atau 91 % dari target anggaran strategis.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di Dinas Perhubungan Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan perhubungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas serta informasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.

Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase realisasi keuangan yang hampir mencapai 100% dan realisasi fisik yang hampir mencapai 100% walaupun masih ada Program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19, dana yang dialokasikan sudah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Realisasi keuangan dan fisik Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Realisasi Fisik dan Keuangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	%
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	4.621.065.538	2,41	46,06	3.017.819.230	65,31
	a. Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum	330.597.936	0,17	43,67	144.371.000	43,67
	b. Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik	111.654.340	0,06	-	-	-
	c. Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran	1.396.792.300	0,73	84,96	1.186.784.345	84,96
	d. Pengaturan Kelancaran lalu Lintas Penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji	94.536.889	0,05	3,59	3.396.800	3,59
	e. Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional	427.234.400	0,22	26,11	111.564.000	26,11
	f. Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah	599.190.400	0,31	48,00	287.618.000	48,00
	g. Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana	287.817.319	0,15	87,94	223.149.000	77,53
	h. Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan	250.341.741	0,13	57,94	112.300.000	44,86
	i. Pembinaan Bengkel Karoseri	79.892.400	0,04	65,34	52.200.000	65,34
	j. Penertiban Angkutan Umum	271.483.576	0,14	57,02	230.009.000	84,72
	k. Wahana Tata Nugraha	239.986.927	0,12	92,53	222.048.935	92,53
	l. Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin	105.934.918	0,06	57,19	60.588.600	57,19
	m. Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja	112.748.156	0,06	99,50	112.182.250	99,50
	n. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	30.520.500	0,02	7,89	2.408.500	7,89
	o. Pekan Nasional Keselamatan Jalan	282.333.736	0,15	94,52	269.198.800	95,35



NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	%
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	9.880.228.149	5,15	92,10	9.046.330.470	91,56
	a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh	499.972.853	0,26	100,00	481.774.328	96,36
	b. Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat daya	974.965.684	0,51	50,00	798.948.045	81,95
	c. Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren	969.693.133	0,51	91,67	917.374.005	89,06
	d. Pengadaan Delinator pada ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek	649.570.004	0,34	100,00	588.742.254	90,64
	e. Pengadaan Traffic Light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhoksukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.728.989.800	0,90	87,26	1.464.730.177	84,72
	f. Pengadaan cermin tikungan pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Kreung Geukueh Kab. Aceh Utara	548.320.044	0,29	100,00	508.141.854	92,67
	g. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan ada titik Keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Tumon - Singkil	399.997.480	0,21	100,00	327.533.250	81,88
	h. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Gayo Lues - Babah Rot	2.075.966.767	1,08	100,00	1.997.283.000	96,21
	i. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail / Barrier pada Lintasan Lokop - Gayo Lues - dan lintasan Pining - Blang Kejeran	2.032.752.384	1,06	100,00	1.961.803.557	96,51
3	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	131.871.534.225	68,68	92,59	121.109.289.849	91,84
	a. Rencana Induk Kreta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh	1.099.931.311	0,57	100,00	1.028.060.000	93,47
	b. Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pengembangan Sistem & Multimoda)	528.354.329	0,28	91,39	487.195.104	92,21
	c. Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi (Bidang Pelayaran)	940.813.406	0,49	39,71	373.630.449	39,71
	d. Pemeliharaan SBNP	300.916.000	0,16	99,96	300.807.000	99,96
	e. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)	42.575.000.000	22,17	99,42	36.781.651.927	86,39



NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	%
	f. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)	34.066.000.000	17,74	99,57	33.735.632.264	99,03
	g. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)	22.744.725.000	11,85	99,45	20.630.567.044	90,70
	h. Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan	1.408.542.428	0,73	80,95	1.140.208.358	80,95
	i. Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja	13.490.818.483	7,03	87,12	12.870.809.500	95,40
	j. Pengadaan Halte Portable	387.890.061	0,20	99,37	385.394.000	99,36
	k. Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja	211.239.168	0,11	100,00	199.144.000	94,27
	l. Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja	1.349.301.057	0,70	90,22	1.299.641.000	96,32
	m. Pemeliharaan Digital Signage pada Halte Trans Kutaraja	50.000.000	0,03	99,53	49.764.000	99,53
	n. Pemeliharaan Aksesoris Interior dan Eksterior Bus Trans Kutaraja	242.000.000	0,13	99,97	241.935.000	99,97
	o. Penyelenggaraan Terminal Tipe B	896.185.622	0,47	85,91	769.927.305	85,91
	p. Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Singkil	570.463.300	0,30	89,85	529.379.756	92,8
	q. Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM	1.797.045.937	0,94	76,65	1.614.609.673	89,85
	r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan	1.730.033.472	0,90	98,28	1.700.214.051	98,28
	s. Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues	2.162.001.499	1,13	99,63	2.080.527.068	96,23
	t. Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil	500.802.776	0,26	100,00	483.591.350	96,56
	u. Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan	2.637.047.000	1,37	100,00	2.360.740.000	89,52
	v. Peningkatan Fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Babon	2.182.423.376	1,14	100,00	2.045.861.000	93,74
JUMLAH TOTAL		192.014.836.820	100	76,92	170.327.894.333	88,71



Dari Rp. 192.014.836.820,- anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Aceh atau sebesar 76,23 %, dan senilai Rp. 146.372.827.912,- digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.642.008.908,- atau 23,77 % digunakan untuk membiayai program dan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran.

Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 192.014.836.820,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 170.327.894.333,- atau 88,71 %. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 92,54 % seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2019 dengan 2020

Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	%
2019	285.378.642.378	264.081.551.602	92,54
2020	192.011.536.820	170.327.894.333	88,71

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan mendukung visi misi Pemerintah Aceh. Akhirnya, semoga LKj ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Perhubungan Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

4.1. KESIMPULAN

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Dinas Perhubungan Aceh terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pelayanan transportasi. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2020, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp. 192.011.536.820,- terealisasi sebesar Rp. 170.327.894.333,- atau **88,71 %** dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.686.942.487,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh.
2. Sasaran strategis kinerja Dinas Perhubungan Aceh dari 7 Program dan 62 Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2020 dengan 1 (satu) Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (Tiga) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan.



3. Pada sasaran Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 146.372.827.912 dan terealisasi sebesar Rp. 133.173.439.549 dengan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran sebesar 4.621.065.538 dan terealisasi sebesar 3.017.819.230 atau sebesar 65,31 % dengan tingkat efisiensi sebesar 34,69 %. Dari pencapaian realisasi terlihat bahwa ini menunjukkan realisasinya masih belum menunjukkan ketinggian yang baik.
4. Pada Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 9.880.228.149 dan terealisasi sebesar Rp. 9.046.330.470 atau 91,56 % dengan tingkat efisiensi sebesar 8,44 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.
5. Pada Program Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 131.871.534.225 dan yang terealisasi sebesar Rp. 121.109.289.849 atau 91,84 % dengan tingkat efisiensi sebesar 8,16 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.
6. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara umum telah terlaksana secara baik dan lancar dengan alokasi anggaran Rp. 192.014.836.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.327.894.333,- atau capaian **88,71 %** atau dengan nilai tingkat capaian kinerja **Baik**

4.2 UPAYA DI MASA MENDATANG

Pencapaian yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 termasuk kategori baik dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan mengingat ada beberapa indikator kinerja dengan hasil yang masih kurang memuaskan seperti pada indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (Persentase Layanan Angkutan Darat) dikarenakan masih ada beberapa terminal dengan bangunan fisik yang masih belum memenuhi standar pelayanan.



Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain :

1. Untuk mewujudkan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Terminal Type B perlu penerapan strategi yang optimal. Demi tercapainya standar pelayanan yang modern pada Terminal Type B di Aceh, maka perlu menerapkan pengembangan pelayanan fasilitas berbasis teknologi informasi kajian system informasi manajemen terminal, penerapan pelayanan e-ticketing, e-payment retribusi, aplikasi/website, check point, help point serta adanya kerjasama pengelolaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dimana keterlibatan pihak ketiga sebagai pengelola.
2. Dengan merevitalisasi beberapa terminal secara bertahap.
3. Untuk pekerjaan yang gagal lelang dan masih dibutuhkan tahun berikutnya, akan dianggarkan.
4. Beberapa kegiatan strategis dalam hal penyelenggaraan Terminal Tipe B untuk pelayanan di terminal yang modern diantaranya : pengoperasian kembali terminal setelah proses Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D)

Semua moda transportasi harus meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) juga harus diterapkan guna menjamin keselamatan penumpang. Rampcheck dan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam menggunakan angkutan umum adalah yang terpenting.

